



Global Energy Governance Dalam Pengelolaan Sungai Mekong Sebagai Sumber Daya Air Bersama (2023-2025)

Muhammad Faritzal Fikri¹⁾, Joscha Dafa Allegra Tombokan²⁾, Muhammad Azizul Hakim³⁾,
Muhammad Indrawan Jatmika⁴⁾

UPN "Veteran" Jawa Timur, Gunung Anyar, Surabaya, Indonesia

mfaritfikri@gmail.com¹⁾, joschadafa@gmail.com²⁾, muhammadazizul796@gmail.com³⁾
m.indrawan.hi@upnjatim.ac.id⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Global Energy Governance dalam pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama pada periode 2023-2025, dengan menggunakan kerangka analisis yang dikembangkan oleh Thijs Van de Graaf. Pendekatan ini menekankan empat komponen utama, yaitu aktor, institusi, norma/aturan, dan mekanisme global, serta lima tujuan utama, yakni keamanan energi, pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, tata kelola domestik yang baik, dan keamanan internasional. Studi ini menunjukkan bahwa Mekong River Commission berperan sebagai aktor kunci dalam memfasilitasi kerja sama lintas negara melalui instrumen seperti *Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement (PNPCA)* dan *Basin Development Strategy (BDS) 2021–2030*. Dalam praktiknya, pengembangan hidroenergi di kawasan Mekong berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan integrasi pasar energi, namun juga menimbulkan tantangan serius terhadap keberlanjutan lingkungan, seperti degradasi ekosistem dan penurunan keanekaragaman hayati. Melalui mekanisme koordinasi, berbagi data, dan pendekatan berbasis bukti, MRC berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam implementasi prinsip tata kelola yang baik, terutama terkait kepatuhan negara, transparansi, dan distribusi manfaat yang adil. Oleh karena itu, penguatan institusi, harmonisasi kebijakan nasional, dan peningkatan partisipasi aktor non-negara menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola energi dan sumber daya air yang berkelanjutan di kawasan Mekong. Penelitian ini menemukan adanya ketidakpatuhan Laos terhadap mekanisme PNPCA dalam kerangka Mekong River Commission, yang tercermin dari tetap dilanjutkannya pembangunan proyek seperti Xayaburi Dam dan Don Sahong Dam meskipun proses *prior consultation* belum menghasilkan kesepakatan dengan negara hilir. Ketidakpatuhan ini juga terlihat dari percepatan implementasi proyek sebelum konsultasi selesai pengabaian keberatan Kamboja dan Vietnam terkait dampak ekologis, serta keterbatasan transparansi data lingkungan yang dibagikan. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme PNPCA bersifat tidak mengikat, sehingga negara cenderung mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan komitmen terhadap tata kelola sumber daya bersama yang berkelanjutan.

Kata kunci: Global Energy Governance, Hidroenergi, Kerjasama Internasional Mekong River Commission, Sungai Mekong, Tata kelola lingkungan

Abstract

This study examines the implementation of Global Energy Governance in the management of the Mekong River as a shared water resource during the period 2023-2025, using the analytical framework developed by Thijs Van de Graaf (2016). This framework highlights four main components actors, institutions, norms/rules, and global mechanisms as well as five key goals: energy security, economic development, environmental sustainability, domestic good governance, and international security. The findings indicate that the Mekong River Commission plays a central role in facilitating transboundary cooperation through



instruments such as the Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement (PNPCA) and the Basin Development Strategy (BDS) 2021–2030. In practice, hydropower development in the Mekong region contributes to regional economic growth and energy market integration, but it also generates significant environmental challenges, including ecosystem degradation and biodiversity loss. Through coordination mechanisms, data-sharing systems, and evidence-based approaches, the MRC seeks to balance these competing interests. However, this study finds persistent gaps in the implementation of good governance principles, particularly in terms of state compliance, transparency, and equitable benefit-sharing. Strengthening institutional capacity, harmonizing national policies, and enhancing the participation of non-state actors are therefore essential to achieving sustainable energy and water governance in the Mekong region. The study finds evidence of Laos' non-compliance with the PNPCA mechanism within the Mekong River Commission framework, as reflected in the continued development of projects such as Xayaburi Dam and Don Sahong Dam despite the prior consultation process not reaching consensus with downstream countries. This non-compliance is further indicated by the acceleration of project implementation before consultations were completed, the disregard of objections from Cambodia and Vietnam regarding ecological impacts, and the limited transparency in the disclosure of environmental data. These findings suggest that the PNPCA mechanism is non-binding in nature, allowing states to prioritize national interests over commitments to sustainable shared resource governance.

Keywords: *Environmental Governance, Global Energy Governance, Hydropowers, International Cooperation, Mekong River Commission, Mekong River.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya air lintas batas merupakan salah satu isu strategis dalam studi hubungan internasional, terutama dalam konteks Global Energy Governance. Sungai Mekong menjadi salah satu contoh paling kompleks dari pengelolaan sumber daya bersama karena mengalir melintasi enam negara Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam serta menjadi sumber kehidupan bagi lebih dari 60 juta penduduk di kawasan Asia Tenggara (Hirsch, 2016). Sungai ini memiliki peran vital dalam mendukung sektor pertanian, perikanan, transportasi, serta energi hidroelektrik yang terus berkembang dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Mekong River Commission, kawasan Mekong merupakan salah satu wilayah dengan potensi hidroenergi terbesar di dunia, yang menjadikannya pusat perhatian dalam dinamika pembangunan energi regional (Mekong River Commission, 2021). Dalam konteks Global Energy Governance sebagaimana dikemukakan oleh Thijs Van de Graaf (2016), tata kelola energi global tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga berbagai aktor non-negara, institusi internasional, norma, dan mekanisme yang saling berinteraksi. Kerangka ini menekankan lima tujuan utama, yaitu keamanan energi, pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, tata kelola domestik yang baik, serta keamanan internasional. Sungai Mekong menjadi arena penting dalam implementasi konsep ini karena meningkatnya pembangunan bendungan hidroelektrik sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, khususnya di negara seperti Laos yang berupaya memanfaatkan sumber daya air untuk ekspor energi ke negara tetangga (Urban et al., 2017).

Namun demikian, pembangunan hidroenergi di Sungai Mekong juga menimbulkan berbagai tantangan serius, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial yang bersifat lintas batas. Studi yang dilakukan oleh Ziv et al. (2012) menunjukkan bahwa pembangunan bendungan di Mekong dapat menyebabkan penurunan signifikan pada populasi ikan serta mengancam ketahanan pangan masyarakat yang bergantung pada perikanan (Ziv et al., 2012). Selain itu, penelitian terbaru juga menegaskan bahwa bendungan berkontribusi terhadap perubahan aliran sedimen yang berdampak pada kesuburan lahan pertanian di wilayah hilir, khususnya di delta Mekong di Vietnam (Hecht, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya trade-off yang kompleks antara kebutuhan energi dan keberlanjutan lingkungan, yang menjadi tantangan utama dalam implementasi Global Energy Governance di kawasan ini. Untuk mengelola kompleksitas tersebut, Mekong River Commission mengadopsi pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM) sebagai dasar dalam pengelolaan Sungai Mekong. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi lintas sektor dan lintas negara dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga berbagai kepentingan seperti energi, pertanian, perikanan, dan lingkungan dapat



dikelola secara seimbang. Dalam dokumen Basin Development Strategy 2021–2030, MRC menegaskan bahwa pendekatan IWRM bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan melalui koordinasi kebijakan dan pengelolaan yang terpadu (Mekong River Commission, 2021).

Selain itu, MRC juga mengembangkan berbagai instrumen kelembagaan untuk mendukung implementasi tata kelola tersebut. Salah satu instrumen utama adalah Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement (PNPCA) yang diadopsi pada tahun 2003. Mekanisme ini mengharuskan negara anggota untuk melakukan notifikasi dan konsultasi sebelum melaksanakan proyek yang berpotensi menimbulkan dampak lintas batas, seperti pembangunan bendungan. PNPCA berfungsi sebagai platform untuk mengevaluasi dampak proyek secara kolektif serta mendorong transparansi dan kerja sama antarnegara (Mekong River Commission, 2003). Dengan demikian, MRC tidak hanya berperan sebagai forum koordinasi, tetapi juga sebagai mekanisme diplomasi air yang memperkuat kepercayaan antarnegara. Lebih lanjut, MRC juga memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policymaking). Melalui sistem pemantauan dan pengumpulan data hidrologi, kualitas air, dan sedimen, MRC menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh negara anggota untuk merencanakan pembangunan secara lebih berkelanjutan (Mekong River Commission, 2023b). Selain itu, penggunaan Decision Support Framework (DSF) memungkinkan analisis berbasis model yang membantu mengevaluasi dampak berbagai skenario pembangunan terhadap ekosistem sungai (Mekong River Commission, 2009). Pendekatan ini menunjukkan bahwa tata kelola Sungai Mekong tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi juga pada data ilmiah yang dapat diverifikasi.

Meskipun demikian, implementasi Global Energy Governance di Sungai Mekong masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara kebijakan regional dan implementasi di tingkat nasional. Perbedaan kepentingan ekonomi dan politik antarnegara sering kali menghambat efektivitas kerja sama, terutama dalam hal kepatuhan terhadap mekanisme yang telah disepakati (Dore et al., 2012). Selain itu, fragmentasi kelembagaan di tingkat nasional juga menjadi hambatan dalam menciptakan koordinasi yang efektif antar sektor (Geheb & Suhardiman, 2019). Keterlibatan aktor non-negara, seperti masyarakat sipil dan organisasi lingkungan, juga masih terbatas, sehingga menimbulkan kritik terhadap kurangnya inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan. Dalam periode 2023-2025, dinamika pengelolaan Sungai Mekong semakin kompleks seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air akibat perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan intensifikasi pembangunan infrastruktur energi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tata kelola yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Global Energy Governance memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana interaksi antara aktor, institusi, norma, dan mekanisme dapat memengaruhi pengelolaan sumber daya energi dan air secara lintas batas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Global Energy Governance dalam pengelolaan Sungai Mekong melalui peran Mekong River Commission, serta mengevaluasi sejauh mana instrumen dan mekanisme yang dikembangkan mampu menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di kawasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tata kelola energi global, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya air lintas batas di kawasan berkembang. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran Mekong River Commission sebagai platform untuk mengakomodasi kepentingan negara-negara riparian yang berpotensi mengalami konflik. Melalui mekanisme dialog, pertukaran data, dan perencanaan regional, MRC berfungsi dalam mereduksi ketegangan dan mendorong kerja sama lintas batas (Staubli, 2018). Selain itu, MRC juga berperan dalam menyeimbangkan dinamika kekuatan di kawasan, khususnya dalam konteks meningkatnya pengaruh China sebagai aktor hulu yang memiliki dampak signifikan terhadap aliran Sungai Mekong melalui pembangunan bendungan besar (Hogan, 2021). Dalam hal ini, MRC tidak hanya berfungsi sebagai institusi teknis, tetapi juga sebagai arena diplomasi regional untuk mendorong tata kelola air dan energi

yang lebih adil dan berkelanjutan (Middleton, 2016).

Perbedaan utama antara penelitian ini dan studi yang dilakukan oleh Carl Middleton terletak pada kerangka analisis, fokus kajian, dan tujuan penelitian. Penelitian Middleton umumnya menggunakan pendekatan political ecology yang bersifat kritis dengan menyoroti relasi kekuasaan, ketimpangan, serta dampak sosial-ekologis dari pembangunan bendungan di Sungai Mekong, khususnya terhadap masyarakat lokal yang terdampak (Middleton, 2016). Fokusnya lebih diarahkan pada bagaimana proyek-proyek pembangunan seperti hidroelektrik yang dapat menciptakan ketidakadilan lingkungan dan marginalisasi komunitas, sehingga analisisnya cenderung berada pada level regional hingga lokal dengan perspektif normatif-kritis. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan kerangka Global Energy Governance (GEG) yang menempatkan Sungai Mekong dalam konteks tata kelola energi global, dengan menekankan interaksi antara negara, institusi internasional, dan aktor non-negara dalam mengelola sumber daya air sebagai bagian dari sistem energi (Graaf & Colgan, 2016). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat dampak pembangunan, tetapi juga menelaah bagaimana mekanisme governance, koordinasi lintas negara, serta norma dan institusi global memengaruhi pengelolaan Sungai Mekong pada periode 2023-2025. Oleh karena itu, kontribusi utama penelitian ini dibandingkan Middleton adalah memperluas analisis dari yang semula berfokus pada kritik sosial-ekologis menjadi kajian multi-level governance yang menghubungkan dinamika lokal dengan struktur tata kelola energi global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami implementasi Global Energy Governance dalam pengelolaan Sungai Mekong pada periode 2023-2025. Kerangka analisis yang digunakan mengacu pada konsep yang dikembangkan oleh Thijs Van de Graaf (2016), yang menekankan empat komponen utama, yaitu aktor, institusi, norma/aturan, dan mekanisme global, serta lima tujuan utama dalam tata kelola energi global, yaitu keamanan energi, pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, tata kelola domestik yang baik, dan keamanan internasional. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap proses, dinamika, dan interaksi antaraktor dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, seperti dokumen resmi Mekong River Commission (misalnya *Basin Development Strategy 2021-2030* dan *Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement*), artikel jurnal ilmiah bereputasi, laporan organisasi internasional, serta buku akademik yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan konteks temporal 2023-2025 untuk melihat dinamika terkini, termasuk perkembangan kebijakan, proyek bendungan, serta isu lingkungan dan energi yang berkembang di kawasan Mekong.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber yang memiliki kredibilitas tinggi dan dapat diakses secara akademik, baik melalui database jurnal internasional maupun situs resmi lembaga terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama dalam implementasi tata kelola energi dan air, seperti harmonisasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, peran aktor non-negara, serta tantangan implementasi di tingkat nasional. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari dokumen institusi, jurnal akademik, dan laporan internasional. Selain itu, peneliti juga melakukan interpretasi kritis terhadap data guna memahami hubungan sebab-akibat dan implikasi kebijakan yang lebih luas. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif, sistematis, dan mendalam mengenai peran Mekong River Commission dalam mengelola Sungai Mekong sebagai sumber daya bersama dalam kerangka Global Energy Governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Domestic and International Interaction

Interaksi antara dinamika domestik dan internasional merupakan faktor kunci dalam memahami tata kelola Sungai Mekong dalam kerangka Global Energy Governance. Kebijakan yang diambil oleh negara-negara anggota tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan nasional, tetapi juga oleh norma, tekanan, dan mekanisme kerja sama regional yang difasilitasi oleh Mekong River Commission. Negara seperti Laos memprioritaskan pembangunan hidroenergi sebagai strategi ekonomi, sementara negara hilir seperti Vietnam lebih menekankan keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan (Geheb & Suhardiman, 2019). Perbedaan kepentingan ini menciptakan dinamika kompleks antara kebutuhan domestik dan kewajiban internasional. Melalui mekanisme seperti Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement (PNPCA), Mekong River Commission menyediakan platform konsultasi lintas negara yang memungkinkan integrasi kepentingan domestik ke dalam kerangka regional (Mekong River Commission, 2003). Selain itu, prinsip-prinsip seperti equitable and reasonable utilization dan no significant harm menjadi norma penting dalam mengatur interaksi tersebut. Namun, penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara komitmen regional dan implementasi nasional, terutama karena faktor politik domestik dan perbedaan kapasitas institusional (Geheb & Suhardiman, 2019).

Interaksi domestik-internasional juga dipengaruhi oleh tekanan global, termasuk perubahan iklim dan kebutuhan energi yang meningkat. Dalam konteks ini, Global Energy Governance memberikan kerangka untuk memahami bagaimana interaksi antara aktor domestik dan internasional dapat membentuk kebijakan pengelolaan sumber daya air lintas batas (Graaf & Colgan, 2016). Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan Sungai Mekong sangat bergantung pada kemampuan negara untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dengan komitmen internasional secara efektif.

Private Actors and Transnational Governance

Dalam konteks Global Energy Governance, aktor swasta dan jaringan transnasional memainkan peran yang semakin penting dalam pengelolaan Sungai Mekong. Aktor-aktor ini meliputi perusahaan energi, lembaga keuangan internasional, serta organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pembangunan dan pendanaan proyek hidroelektrik. Keterlibatan aktor swasta sangat signifikan karena proyek bendungan membutuhkan investasi besar dan teknologi canggih, yang sering kali berasal dari perusahaan multinasional dan lembaga keuangan global. Selain itu, lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank juga berperan dalam menetapkan standar lingkungan dan sosial dalam proyek-proyek energi (The World Bank, 2020). Standar ini mencakup kewajiban pelaksanaan Environmental Impact Assessment (EIA) dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak, yang menjadi bagian dari tata kelola transnasional. Di sisi lain, organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil berperan sebagai pengawas yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan (Sneddon et al., 2012).

Peran Mekong River Commission dalam konteks ini adalah memfasilitasi interaksi antara berbagai aktor tersebut melalui mekanisme konsultasi dan berbagi informasi. Namun, keterlibatan aktor swasta juga menimbulkan tantangan, terutama terkait konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan energi cenderung berorientasi pada keuntungan, sementara dampak sosial dan ekologis sering kali menjadi isu yang diperdebatkan (Urban et al., 2017). Meskipun demikian, tata kelola transnasional juga memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sungai Mekong melalui transfer teknologi, investasi, dan penerapan standar global. Dalam kerangka Global Energy Governance, keterlibatan aktor non-negara menunjukkan bahwa tata kelola energi tidak lagi bersifat state-centric, tetapi melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang beragam (Graaf & Colgan, 2016). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu mengintegrasikan kepentingan aktor swasta ke dalam kerangka tata kelola yang berkelanjutan dan inklusif.



Security of Energy Supply and Demand

Dalam konteks pengelolaan Sungai Mekong, keamanan pasokan dan permintaan energi menjadi salah satu tujuan utama yang mendorong pembangunan hidroenergi di kawasan tersebut. Negara-negara seperti Laos memanfaatkan potensi aliran Sungai Mekong untuk mengembangkan bendungan sebagai sumber energi listrik yang kemudian diekspor ke negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam (International Rivers, 2020). Dalam hal ini, Mekong River Commission berperan dalam memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak hanya meningkatkan kapasitas energi, tetapi juga tetap mempertimbangkan stabilitas regional. Melalui mekanisme seperti Basin Development Strategy (BDS) 2021–2030, MRC berupaya mengoordinasikan perencanaan energi agar selaras dengan kebutuhan regional dan kapasitas lingkungan. Selain itu, mekanisme Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement (PNPCA) memastikan bahwa proyek-proyek bendungan tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui proses konsultasi bersama (Mekong River Commission, 2003). Hal ini berkontribusi pada terciptanya sistem energi yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi pada hidroenergi juga menimbulkan risiko, terutama dalam menghadapi perubahan iklim yang dapat memengaruhi debit air sungai. Oleh karena itu, keamanan energi di kawasan Mekong tidak hanya bergantung pada kapasitas produksi, tetapi juga pada kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan (Roberts, 2022).

Selain itu, Mekong River Commission juga memperkuat pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM) melalui koordinasi perencanaan operasi bendungan antarnegara agar pelepasan air tidak dilakukan secara unilateral. Dalam kerangka security of supply and demand, kebijakan ini penting karena membantu menjaga kestabilan pasokan listrik regional sekaligus mengurangi risiko krisis air di negara hilir seperti Vietnam dan Kamboja. Penguatan tersebut dilakukan melalui implementasi Regional Flood and Drought Management Strategy 2020–2025 yang mulai diterapkan sejak Januari 2020 dan diperkuat kembali pada periode 2023-2025 melalui pengembangan Regional Flood and Drought Management Centre (RFDMC) serta sistem real-time hydrological data sharing sejak Juli 2023 (Mekong River Commission, 2023). Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas karena mekanisme koordinasi MRC, termasuk melalui PNPCA, tetap bersifat tidak mengikat sehingga kepatuhan negara terhadap pengaturan debit air sangat bergantung pada komitmen politik masing-masing pemerintah. Akibatnya, potensi ketidakstabilan pasokan energi akibat fluktuasi debit air masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya dapat diatasi dalam tata kelola energi regional Sungai Mekong.

Economic Development

Pembangunan hidroenergi di Sungai Mekong telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan tersebut (Mekong River Commission, 2021). Laos, misalnya, memosisikan diri sebagai “battery of Southeast Asia” dengan mengekspor listrik ke negara tetangga. Laos yang mengandalkan ekspor listrik sebagai sumber devisa utama. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Laos mencapai sekitar 3,7% dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 4-4,3% pada 2024-2025, dengan sektor listrik dan investasi energi menjadi salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan tersebut (The World Bank, 2024). Investasi asing di sektor kelistrikan dan pertambangan juga mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2023, terutama melalui proyek-proyek bendungan dan ekspor listrik lintas batas ke Thailand dan Vietnam. Strategi ini memungkinkan Laos untuk meningkatkan pendapatan nasional dan menarik investasi asing dalam sektor energi (Urban et al., 2017). Peran Mekong River Commission dalam konteks ini adalah menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan integrasi pasar energi regional. Melalui BDS dan berbagai forum koordinasi, MRC mendorong harmonisasi kebijakan yang dapat mengurangi hambatan investasi dan meningkatkan efisiensi pasar energi. Selain itu, MRC juga menyediakan data dan analisis yang membantu negara anggota dalam merencanakan proyek energi secara lebih optimal.



Namun, pembangunan ekonomi yang berbasis pada hidroenergi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang tidak dapat diabaikan. Ketergantungan pada proyek bendungan besar dapat meningkatkan risiko ketimpangan distribusi manfaat, di mana keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pemerintah dan investor, sementara masyarakat lokal menghadapi dampak negatif seperti relokasi dan penurunan sumber mata pencaharian (International Energy Agency, 2022). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dalam konteks Global Energy Governance harus diimbangi dengan kebijakan yang memastikan distribusi manfaat yang adil. Dari perspektif tata kelola, tantangan utama terletak pada upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi nasional dengan keberlanjutan ekosistem lintas batas. Meskipun Mekong River Commission telah menyediakan berbagai mekanisme koordinasi regional, implementasi kebijakan tetap bergantung pada komitmen masing-masing negara, sehingga sering kali terjadi kesenjangan antara kerangka regional dan praktik nasional. Studi MRC menunjukkan bahwa pembangunan hidroenergi selalu melibatkan trade-off antara manfaat ekonomi dengan risiko terhadap sektor lain seperti pangan, lingkungan, dan keamanan air (Smajgl et al., 2019). Selain itu, dinamika perubahan iklim semakin memperumit hubungan antara energi dan ekosistem di Sungai Mekong. Variabilitas aliran air akibat perubahan iklim dapat mengurangi manfaat hidroenergi sekaligus meningkatkan tekanan terhadap ekosistem sungai, sehingga memperbesar ketidakpastian dalam perencanaan energi jangka panjang. Oleh karena itu, dalam kerangka Global Energy Governance, pembangunan hidroenergi di Mekong tidak hanya harus berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada prinsip keadilan distribusi, keberlanjutan lingkungan, serta koordinasi lintas negara yang lebih kuat (Zhong et al., 2021).

Environmental Sustainability

Keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan Sungai Mekong. Pembangunan bendungan hidroelektrik secara masif telah menyebabkan berbagai dampak ekologis, seperti perubahan aliran alami sungai, fragmentasi habitat, serta penurunan populasi ikan (Ziv et al., 2012). Pembangunan bendungan hidroelektrik secara masif telah menyebabkan berbagai dampak ekologis, seperti perubahan aliran alami sungai, fragmentasi habitat, serta penurunan populasi ikan di Sungai Mekong. Sejumlah studi terbaru menunjukkan bahwa dampak ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah terukur secara signifikan. Misalnya, penelitian jangka panjang di kawasan Tonle Sap bagian integral dari sistem Mekong menunjukkan bahwa populasi ikan mengalami penurunan hingga 87,7% dalam periode 2003-2019, dengan mayoritas spesies mengalami tren penurunan akibat perubahan aliran dan fragmentasi habitat (Sor et al., 2023). Selain itu, laporan terbaru menunjukkan bahwa sekitar 19% spesies ikan Mekong berada dalam risiko kepunahan, terutama akibat pembangunan bendungan yang menghambat migrasi dan mengubah kualitas air (Index, 2024). Studi terbaru juga menegaskan bahwa sekitar 35% ikan migratori di kawasan Mekong berada dalam kondisi terancam, mencerminkan tekanan yang semakin meningkat akibat ekspansi bendungan. Dari sisi hidrologi, pembangunan bendungan telah mengubah pola aliran musiman (flood pulse) yang menjadi kunci produktivitas perikanan Mekong, sehingga berdampak langsung pada penurunan hasil tangkapan dan terganggunya siklus reproduksi ikan (Lauri et al., 2012). Bahkan, tren terbaru menunjukkan fenomena penurunan ukuran ikan secara signifikan sebagai indikasi tekanan ekologis yang serius terhadap keberlanjutan populasi (Nuon et al., 2025). Dengan demikian, data empiris ini memperkuat argumen bahwa pengelolaan Sungai Mekong menghadapi tantangan serius, bahkan mencerminkan keterbatasan tata kelola dalam mengendalikan dampak kumulatif pembangunan bendungan terhadap keberlanjutan ekosistem dan ketahanan pangan regional. Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa bendungan juga menghambat aliran sedimen yang sangat penting bagi kesuburan delta Mekong di Vietnam (Ang et al., 2024). Dalam menghadapi tantangan ini, Mekong River Commission mengadopsi pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM) yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan (Mekong River Commission, 2021).



Selain itu, MRC juga mengembangkan berbagai panduan teknis, seperti Preliminary Design Guidance for Mainstream Dams, yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari pembangunan bendungan.

Mekanisme PNPCA juga berperan penting dalam memastikan bahwa setiap proyek bendungan melalui proses evaluasi dampak lingkungan secara komprehensif. Namun, efektivitas mekanisme ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait kepatuhan negara anggota dan keterbatasan dalam penegakan aturan. Oleh karena itu, keberlanjutan lingkungan di Sungai Mekong memerlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, serta peningkatan kapasitas institusional untuk mengawasi dan mengevaluasi dampak pembangunan.

Domestic Good Governance

Tata kelola domestik yang baik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Global Energy Governance di Sungai Mekong (Hirsch, 2016). Mekong River Commission berupaya mendorong prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, melalui berbagai instrumen dan mekanisme kerja sama regional. Salah satu contoh konkret adalah penerapan PNPCA, yang mewajibkan negara anggota untuk membuka informasi terkait proyek pembangunan dan melakukan konsultasi dengan negara lain. Selain itu, MRC juga menyediakan platform bagi berbagai aktor, termasuk pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, implementasi prinsip-prinsip ini di tingkat nasional masih menghadapi berbagai kendala. Studi menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan dan perbedaan kepentingan politik sering kali menghambat koordinasi antarinstansi (Middleton e. a., 2019). Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas, sehingga menimbulkan kritik terhadap kurangnya inklusivitas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk memperkuat kapasitas institusi nasional serta meningkatkan koordinasi antar sektor. Selain itu, peningkatan transparansi dan akses terhadap informasi juga menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang lebih baik.

International Security

Pengelolaan Sungai Mekong juga memiliki implikasi penting terhadap keamanan internasional, terutama dalam konteks hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Konflik kepentingan terkait penggunaan sumber daya air dapat memicu ketegangan, terutama antara negara hulu dan hilir. Dalam hal ini, Mekong River Commission berperan sebagai mekanisme diplomasi yang membantu mengurangi potensi konflik melalui dialog dan kerja sama. Mekanisme seperti PNPCA memungkinkan negara anggota untuk menyelesaikan perbedaan melalui konsultasi, sehingga mengurangi risiko konflik terbuka. Namun, tantangan tetap ada, terutama karena tidak semua negara di kawasan Mekong menjadi anggota penuh MRC. Hal ini dapat membatasi efektivitas organisasi dalam mengelola konflik secara menyeluruh. Selain itu, meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan juga dapat memengaruhi dinamika kerja sama. Meskipun demikian, keberadaan MRC tetap memberikan kontribusi penting dalam menciptakan stabilitas regional. Melalui kerja sama yang berkelanjutan, negara-negara di kawasan Mekong dapat mengelola sumber daya air secara lebih damai dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi Global Energy Governance (GEG) dalam pengelolaan Sungai Mekong sebagai sumber daya air bersama periode 2023-2025, dapat disimpulkan bahwa tata kelola Sungai Mekong mencerminkan kompleksitas interaksi antara kepentingan nasional, dinamika regional, serta tekanan global yang semakin meningkat. Sungai Mekong tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya alam yang vital bagi negara-negara riparian, tetapi juga sebagai arena kontestasi kepentingan antara pembangunan ekonomi, keamanan energi, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka GEG sebagaimana dijelaskan oleh Thijs Van de Graaf, pengelolaan energi tidak dapat dipisahkan dari interaksi multi-level yang



melibatkan aktor negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara. Hal ini terlihat jelas dalam konteks Sungai Mekong, di mana negara-negara seperti Laos memanfaatkan potensi hidroenergi sebagai strategi pembangunan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional. Di sisi lain, negara hilir seperti Vietnam dan Kamboja menghadapi risiko serius terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem akibat perubahan aliran air dan sedimentasi.

Peran Mekong River Commission (MRC) menjadi sangat penting sebagai platform institusional yang memfasilitasi kerja sama regional. Melalui berbagai mekanisme seperti Procedures for Notification, Prior Consultation, and Agreement (PNPCA), MRC berupaya mengintegrasikan kepentingan domestik negara anggota ke dalam kerangka kerja sama lintas batas. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip seperti equitable and reasonable utilization serta no significant harm menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak pembangunan dan kewajiban perlindungan lingkungan. Namun demikian, efektivitas MRC dalam mengelola konflik kepentingan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya mekanisme penegakan (enforcement), yang menyebabkan keputusan yang dihasilkan melalui proses konsultasi tidak selalu diimplementasikan secara optimal oleh negara anggota. Selain itu, perbedaan kapasitas institusional dan prioritas pembangunan nasional turut memperlemah konsistensi kebijakan di tingkat regional.

Dari perspektif keberlanjutan lingkungan, pembangunan bendungan hidroelektrik secara masif telah menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, seperti penurunan populasi ikan, gangguan migrasi biota, serta berkurangnya aliran sedimen yang penting bagi kesuburan delta. Meskipun MRC telah mengadopsi pendekatan Integrated Water Resources Management (IWRM) dan mengembangkan berbagai panduan teknis, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya mampu mengatasi dampak tersebut secara efektif. Lebih lanjut, keterlibatan aktor swasta dan jaringan transnasional juga menjadi elemen penting dalam tata kelola Sungai Mekong. Perusahaan energi multinasional, lembaga keuangan internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank, serta organisasi non-pemerintah memainkan peran dalam pembiayaan, pengembangan teknologi, serta pengawasan terhadap proyek-proyek energi. Kehadiran aktor-aktor ini memperkuat dimensi transnasional dalam GEG, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait akuntabilitas dan distribusi manfaat.

Secara keseluruhan, implementasi Global Energy Governance dalam pengelolaan Sungai Mekong menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola sumber daya air lintas batas sangat bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan kepentingan domestik dengan komitmen internasional. Tanpa adanya koordinasi yang efektif, transparansi, serta komitmen politik yang kuat, potensi konflik dan degradasi lingkungan akan terus meningkat di masa depan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Sungai Mekong dalam kerangka Global Energy Governance. Pertama, perlu adanya penguatan kelembagaan Mekong River Commission, khususnya dalam hal mekanisme penegakan kebijakan. MRC sebaiknya tidak hanya berfungsi sebagai forum konsultatif, tetapi juga memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk memastikan kepatuhan negara anggota terhadap kesepakatan bersama. Mengingat mekanisme PNPCA saat ini bersifat tidak mengikat, reformasi kelembagaan diperlukan agar proses konsultasi memiliki konsekuensi yang lebih jelas terhadap pelaksanaan proyek-proyek lintas batas. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih ketat, serta pemberian insentif maupun disinsentif bagi negara yang tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Kedua, negara-negara anggota perlu meningkatkan integrasi antara kebijakan domestik dan komitmen regional. Pemerintah nasional harus memastikan bahwa perencanaan pembangunan energi, khususnya proyek hidroelektrik, selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan kerja sama lintas batas. Dalam hal ini, harmonisasi regulasi serta peningkatan kapasitas institusional menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antara komitmen dan implementasi. Posisi Mekong River Commission (MRC) dalam tata kelola Sungai Mekong saat ini dapat ditegaskan sebagai aktor regional yang bersifat koordinatif namun lemah secara otoritatif, sekaligus berada dalam posisi “terjepit” di antara dominasi hulu oleh China dan pengaruh



eksternal United States. Secara kelembagaan, MRC bukanlah badan supranasional yang memiliki kekuatan mengikat, melainkan forum kerja sama antarnegara (Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam) yang berfungsi sebagai fasilitator dialog, pertukaran data, dan harmonisasi kebijakan. Akibatnya, MRC tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kepatuhan negara anggota terhadap keputusan bersama, sehingga implementasi kebijakan sangat bergantung pada komitmen politik masing-masing negara. Dalam konteks geopolitik, posisi MRC semakin terbatas karena tidak mencakup China sebagai anggota penuh, padahal China mengontrol bagian hulu Sungai Mekong (Lancang) dan memiliki kapasitas terbesar dalam mengatur debit air melalui bendungan-bendungan besar. Hal ini menjadikan MRC secara struktural berada dalam posisi subordinat terhadap kebijakan unilateral China, terutama dalam isu transparansi data dan pengelolaan aliran air. Di sisi lain, keterlibatan Amerika Serikat melalui berbagai inisiatif kerja sama memperkuat dimensi politik dalam tata kelola Mekong, tetapi tidak secara langsung meningkatkan otoritas formal MRC. Sebaliknya, hal ini justru menempatkan MRC sebagai arena kontestasi pengaruh antara dua kekuatan besar tersebut.

Dengan demikian, secara tegas dapat disimpulkan bahwa MRC saat ini berposisi sebagai “soft institution” yang memiliki legitimasi normatif tetapi lemah dalam kekuatan eksekusi, serta berperan sebagai mediator regional yang harus menavigasi kepentingan negara anggota sekaligus tekanan geopolitik eksternal. Posisi ini membuat MRC penting secara diplomatis, namun terbatas dalam menentukan arah kebijakan secara independen, sehingga efektivitasnya dalam mengelola konflik dan dampak pembangunan di Sungai Mekong masih sangat bergantung pada dinamika kekuasaan di luar institusi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ang, W. J., Park, E., Pokhrel, Y., Tran, D. D., & Loc, H. H. (2024). *Dams in the Mekong : a comprehensive database , spatiotemporal distribution , and hydropower potentials*. 1209–1228.
- Dore, J., Lebel, L., & Molle, F. (2012). A framework for analysing transboundary water governance complexes , illustrated in the Mekong Region. *Journal of Hydrology*, 466–467, 23–36. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.07.023>
- Geheb, K., & Suhardiman, D. (2019). ScienceDirect The political ecology of hydropower in the Mekong River Basin. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 37, 8–13. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.02.001>
- Graaf, T. Van De, & Colgan, J. (2016). Global Energy Governance A Review and Research Agenda. Palgrave Communications. *Palgrave Communications*, 2. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2015.47>
- Hirsch, P. (2016). *The shifting regional geopolitics of Mekong dams*. 51, 63–74. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2015.12.004>
- Hogan, Z. S. (2021). *The Impacts of Hydropower Dams in the Mekong River Basin : A Review*. 1–18.
- Index, L. P. (2024). *MIGRATORY FRESHWATER The Living Planet Index (LPI)*.
- International Energy Agency. (2022). *Southeast Asia Energy Outlook 2022*.
- International Rivers. (2020). *Rights of Rivers*.
- Lauri, H., Moel, H. De, & Ward, P. J. (2012). *Future changes in Mekong River hydrology : impact of climate change and reservoir operation on discharge*. 4603–4619. <https://doi.org/10.5194/hess-16-4603-2012>
- Mekong River Commission. (2003). *Procedural Rules for Mekong Water Diplomacy Procedures for Notification , Prior Consultation and Agreement (PNPCA)*.
- Mekong River Commission. (2009). *Impacts of climate change and development on Mekong flow regimes First assessment - 2009*. 29.
- Mekong River Commission. (2021). *Basin Development Strategy 2021-2030 & MRC Strategic Plan 2021-2025*.



- Mekong River Commission. (2023a). *Flood and Drought*. 2023.
<https://www.mrcmekong.org/flood-and-drought/?utm>
- Mekong River Commission. (2023b). *MRC ANNUAL REPORT 2023*.
- Middleton, C. (2016). *Watershed or Powershed ? Critical Hydropolitics , China and the ‘ Lancang-Mekong Cooperation Framework . ’* 51(3), 100–117.
- Nuon, V., Chea, R., & Hugueny, B. (2025). *Environmental pressures on Mekong fish : Insights from temporal functional diversity dynamics*. 380(February).
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.125138>
- Roberts, D. C. (2022). *Climate Change 2022 : Impacts , Adaptation and Vulnerability Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. <https://doi.org/10.1017/9781009325844>. Front
- Smajgl, A., McConnell, W., Ahlquist, D. B., Ward, J., & Kramer, D. B. (2019). *Reviewing benefits and costs of hydropower development evidence from the Lower Mekong River Basin*. October 2018, 1–16. <https://doi.org/10.1002/wat2.1347>
- Sneddon, C., Fox, C., Sneddon, C., & Fox, C. (2012). *Inland Capture Fisheries and Large River Systems : A Political Economy of*. 12(July), 279–299.
- Sor, R., Ngor, P. B., Lek, S., Chann, K., Khoeun, R., Chandra, S., Hogan, Z. S., & Null, S. E. (2023). *Fish biodiversity declines with dam development in the Lower Mekong Basin*. *Scientific Reports*, 1–12. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-35665-9>
- Staubli, D. M. (2018). *Water diplomacy and conflict management in the Mekong: from rivalries to cooperation*. *Journal of Hydrology*. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.09.059>
- The World Bank. (2020). *Environmental and Social Framework*.
- The World Bank. (2024). *ECONOMIC Accelerating Reforms for Growth*. April.
- Urban, F., Siciliano, G., & Nordensvard, J. (2017). *China ’ s dam-builders: their role in transboundary river management in South-East Asia*. *International Journal of Water Resources Development*, 0627(June), 1–25.
<https://doi.org/10.1080/07900627.2017.1329138>
- Zhong, R., Zhao, T., & Chen, X. (2021). *Evaluating the tradeoff between hydropower benefit and ecological interest under climate change: How will the water-energy-ecosystem nexus evolve in the upper Mekong basin ? Range of Variability Approach*. *Energy*, 237, 121518.
<https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121518>
- Ziv, G., Baran, E., Nam, S., Rodríguez-iturbe, I., & Levin, S. A. (2012). *hydropower in the Mekong River Basin*. <https://doi.org/10.1073/pnas.1201423109>